ANTHOR
Education and Learning Journal
https://anthor.org/index.php/anthor
Email. anthor.Jurnal@gmail.com
E-ISSN: 2963 –198X P-ISSN: 2963–2498 | Halaman: 1222 - 1232
Volume 5 Nomor 5 Tahun 2026

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung

Informasi Naskah

Reza Zaina Nurfadilah[1]
Yeti Rohayeti[2]
Dian Susanti[3]

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

rezazainanurfadilah087@gmail.com

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini dilatar belakangi dengan belum optimalnya terkait kebijan penanggulangan kemiskinan terutama dalam program Pelayanan Kesejahteraan Sosial Satu Pintu di Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung. Dari permasalahan tersebut, peneliti merumuskan masalah"Bagaiamana Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bandung Kidul". Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori Implementasi Kebijakan yang di kemukakan oleh Edward III dalam Winarno (2014:176) dengan dimensi komunikasi, sumberdaya,disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam observasi partisipan dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan teori implementasi kebijakan Edward III dengan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam penanggulangan kemiskinan belum optimal dan berdasarkan penarikan makna dari penelitian ini ditemukan dimensi lain yaitu Dimensi Kolaborasi Antaraktor sebagai enabler yang mengembangkan teori implementasi kebijakan. Pentingnya dimensi Kolaborasi Antaraktor dalam Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan perekat keterlibatan berbagai pihak terkait seperti Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan, PUSKESOS, RT/RW, kader sosial, dan Masyarakat untuk Keberhasilan program yang berkelanjutan.

Kata Kunci:
Implementasi Kebijakan, Kemiskinan, Pelayanan.

Abstract

This study is motivated by the suboptimal implementation of poverty alleviation policies, particularly within the "One-Stop Social Welfare Service" program in the Bandung Kidul District of Bandung City. Based on this issue, the researcher formulated the research question: "How is the poverty alleviation policy implemented in Bandung Kidul District?" The study draws upon Edward III's policy implementation theory as cited in Winarno (2014:176) which encompasses the dimensions of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. A descriptive method with a qualitative approach was employed. Data collection techniques included in-depth interviews, participant observation, and document analysis. The findings indicate that the application of Edward III's framework (communication, resources, disposition, and bureaucratic structure) to poverty alleviation efforts remains suboptimal. Furthermore, the study identified an additional dimension "Inter-actor Collaboration as an Enabler" which serves to expand upon the existing policy implementation theory. This dimension of inter-actor collaboration is crucial for fostering the engagement of various stakeholders such as the Social Agency, District and Sub-district administrations, PUSKESOS (Integrated Social Welfare Centers), RT/RW (neighborhood/hamlet associations), social volunteers, and the community thereby ensuring the program's long-term success.

Keyword:
Policy Implementation, Poverty, Service Delivery.

Information Production:
© 2026 *by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike* 4.0 *International* (CC BY-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan sosial dan ekonomi yang kompleks serta *multidimensional*. Kemiskinan tidak hanya menunjukkan rendahnya pendapatan atau ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perlindungan sosial, dan sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup. Sen (1999) melalui pendekatan *capability* memandang kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dan kesempatan individu untuk mencapai kehidupan yang dianggap bernilai. Karena itu, penanggulangan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui peningkatan pendapatan, tetapi juga harus memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dan sumber daya sosial ekonomi.

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

Kemiskinan berkaitan erat dengan ketimpangan sosial. Todaro dan Smith (2020) menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga peningkatan kualitas hidup, pengurangan kemiskinan, dan perubahan struktur sosial ekonomi agar masyarakat memperoleh kehidupan yang lebih baik. Keberhasilan pembangunan karenanya tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari pemerataan manfaat pembangunan bagi kelompok rentan. Tingkat kemiskinan dapat dipengaruhi oleh distribusi pendapatan, kesempatan kerja, pendidikan, kesehatan, kondisi demografis, serta kemampuan pemerintah menyediakan perlindungan sosial. Kompleksitas faktor tersebut membuat penanggulangan kemiskinan membutuhkan keterlibatan berbagai sektor, lembaga, dan masyarakat.

Di Indonesia, kemiskinan masih menjadi tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan. Berdasarkan BPS, pada Maret 2025 persentase penduduk miskin mencapai 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta orang. Meskipun angka tersebut menurun dibandingkan September 2024 dan Maret 2024, kemiskinan perkotaan justru mengalami peningkatan. Persentase penduduk miskin perkotaan naik dari 6,66 persen pada September 2024 menjadi 6,73 persen pada Maret 2025, sementara jumlahnya meningkat dari 11,05 juta menjadi 11,27 juta orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan perkotaan memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri sehingga membutuhkan pendekatan penanggulangan yang lebih spesifik.

Menurut BPS (2025), kemiskinan di Indonesia diukur berdasarkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan melalui garis kemiskinan. Namun, dari perspektif kebijakan publik, kemiskinan memiliki dimensi yang lebih luas. World Bank (2001) menjelaskan bahwa kemiskinan berkaitan dengan *deprivation*, yaitu keterbatasan kesempatan, keamanan, dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Oleh sebab itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak seharusnya hanya berupa pemberian bantuan, tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat keluar dari kerentanan secara berkelanjutan.

Secara hukum, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab dalam menangani kemiskinan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menegaskan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin melalui kebijakan yang terencana, terarah, dan berkelanjutan. Penanganan juga harus dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi karena pelayanan bagi masyarakat miskin sebelumnya tersebar di berbagai sektor dan peraturan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Namun, keberadaan kebijakan dan regulasi tidak otomatis menjamin keberhasilan penanggulangan kemiskinan. Grindle (1980) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Artinya, kebijakan yang telah dirancang dengan baik dapat menghasilkan capaian yang kurang optimal apabila tidak didukung kelembagaan, sumber daya, kepentingan aktor, serta kapasitas pelaksana yang memadai. Permasalahan menjadi lebih kompleks karena masyarakat miskin membutuhkan berbagai layanan, seperti administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan sosial. Jika setiap layanan berjalan secara terpisah, dapat terjadi *fragmentation*, yaitu kondisi ketika berbagai lembaga dan program bekerja dengan mekanisme berbeda sehingga koordinasi dan integrasi pelayanan menjadi kurang optimal. Osborne (2010) menekankan bahwa pelayanan publik modern merupakan proses penciptaan nilai yang melibatkan berbagai aktor sehingga integrasi pelayanan menjadi penting.

Untuk meningkatkan ketepatan sasaran kebijakan sosial, pemerintah mengembangkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, DTSEN menjadi sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial ekonomi dengan tujuan meningkatkan ketepatan sasaran, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. DTSEN mengintegrasikan berbagai sumber data, termasuk Regsosek, DTKS, dan P3KE. Keberadaan DTSEN menunjukkan semakin pentingnya sistem informasi dan tata kelola data yang terintegrasi, meskipun data yang baik tetap harus didukung kemampuan pemerintah daerah dan pelaksana dalam memanfaatkannya untuk pelayanan masyarakat.

Salah satu pendekatan pelayanan yang dapat menjawab kebutuhan tersebut adalah Pelayanan Kesejahteraan Sosial Satu Pintu (PKSSP). Sistem ini bertujuan menyederhanakan akses masyarakat terhadap berbagai layanan yang sebelumnya tersebar di sejumlah lembaga. Melalui pelayanan terpadu, masyarakat miskin dan rentan dapat mengidentifikasi kebutuhan, memperoleh informasi program, mendapatkan rujukan, menyampaikan pengaduan, dan memperoleh tindak lanjut pemerintah. Dengan demikian, PKSSP bukan sekadar pelayanan administratif, tetapi juga menjadi instrumen untuk menghubungkan masyarakat rentan dengan berbagai sumber daya dan program perlindungan sosial.

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

Di Kota Bandung, penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui Program PKSSP yang mengintegrasikan pelayanan kesejahteraan sosial, pendataan masyarakat miskin, pengaduan sosial, rujukan bantuan sosial, serta koordinasi antarperangkat daerah melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) di tingkat kelurahan. Kebijakan ini relevan dengan kondisi masyarakat perkotaan yang menghadapi persoalan sosial beragam dan membutuhkan pelayanan pemerintah yang cepat, terintegrasi, serta mudah diakses. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2020 juga menekankan penurunan jumlah penduduk miskin dan pemenuhan kebutuhan dasar melalui sinergi program sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi dengan dukungan PUSKESOS.

Keberhasilan PKSSP sangat bergantung pada implementasi di tingkat yang paling dekat dengan masyarakat, khususnya kecamatan dan kelurahan. Lipsky (1980) melalui konsep *street-level bureaucracy* menjelaskan bahwa petugas yang berinteraksi langsung dengan masyarakat memiliki peran penting dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik. Keterbatasan sumber daya, beban kerja, diskresi, dan keberagaman kondisi masyarakat dapat memengaruhi keputusan serta tindakan petugas. Di Kecamatan Bandung Kidul, data PKSSP tahun 2026 menunjukkan bahwa dari 50 pengajuan layanan, 41 telah selesai diproses, 3 ditolak, dan 3 masih dalam proses. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar layanan telah ditangani, tetapi masih terdapat pengajuan yang belum selesai atau tidak dapat diproses. Keberhasilan program karenanya tidak cukup dilihat dari jumlah layanan yang selesai, tetapi juga dari kemampuan petugas dalam memberikan informasi, menyediakan sumber daya, melakukan koordinasi, merespons kebutuhan, dan memastikan akses layanan.

Permasalahan lain adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan PKSSP. Hal ini antara lain berkaitan dengan keterbatasan literasi digital dan kurangnya informasi mengenai keberadaan, fungsi, serta mekanisme layanan. Van Dijk (2005) menjelaskan bahwa kesenjangan digital tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan perangkat atau akses internet, tetapi juga kemampuan dan keterampilan menggunakan teknologi secara efektif. Karena itu, digitalisasi pelayanan tanpa peningkatan literasi dan pendampingan dapat menciptakan kesenjangan baru, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan.

Dari sisi pelaksana, keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas, minimnya pelatihan, serta tingginya beban kerja juga dapat mengurangi efektivitas pelayanan. Petugas tidak hanya melakukan pelayanan administratif, tetapi juga sosialisasi, pendataan, verifikasi, penerimaan pengaduan, koordinasi, dan tindak lanjut rujukan. Edwards III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi memastikan kebijakan dipahami secara jelas dan konsisten; sumber daya mencakup staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas; disposisi berkaitan dengan sikap dan komitmen pelaksana; sedangkan struktur birokrasi mencakup mekanisme organisasi dan prosedur pelaksanaan.

Keempat dimensi Edwards III dapat digunakan untuk menganalisis PKSSP di Kecamatan Bandung Kidul secara sistematis. Pada dimensi komunikasi, rendahnya pengetahuan masyarakat menunjukkan kemungkinan adanya persoalan dalam penyampaian informasi. Pada dimensi sumber daya, keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas serta beban kerja dapat memengaruhi kualitas pelayanan. Pada dimensi disposisi, komitmen dan responsivitas petugas menjadi penting karena pelayanan ditujukan kepada masyarakat miskin dan rentan. Sementara itu, struktur birokrasi berkaitan dengan koordinasi antarperangkat daerah, pembagian tugas, prosedur pelayanan, serta mekanisme tindak lanjut untuk memastikan pelayanan satu pintu benar-benar terintegrasi dan tidak mengalami *fragmentation*.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah tersedia secara normatif dengan realitas implementasinya di tingkat lokal. Pemerintah telah memiliki landasan hukum, sistem pelayanan terpadu, mekanisme pendataan, dan kelembagaan pendukung, tetapi masih menghadapi persoalan berupa keterbatasan informasi, literasi digital masyarakat, kapasitas petugas, koordinasi, dan tindak lanjut pelayanan. Persoalan utama bukan hanya keberadaan kebijakan, melainkan bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan, diterjemahkan, dan dilaksanakan sehingga memberikan manfaat nyata kepada masyarakat sasaran.

Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui PKSSP di Kecamatan Bandung Kidul penting dilakukan. Teori Edwards III digunakan untuk menganalisis implementasi melalui empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian diarahkan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis implementasi PKSSP sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Kebaruan penelitian terletak pada penggunaan keempat dimensi Edwards III untuk mengkaji pelaksanaan PKSSP pada tingkat kecamatan, terutama dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat, literasi digital, kapasitas petugas, koordinasi antarorganisasi, serta efektivitas pelayanan satu pintu dalam konteks masyarakat perkotaan yang kompleks.

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung, khususnya melalui program Sistem Layanan Rujukan Terpadu. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam pelaksanaan kebijakan berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Walidin, Saifullah, dan Tabrani (2015) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan proses untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan menghasilkan gambaran yang menyeluruh dan kompleks berdasarkan informasi dari informan dalam kondisi yang alamiah. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kebijakan serta memperoleh informasi dari petugas pemerintah kecamatan dan masyarakat penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai sumber yang telah tersedia, seperti buku, jurnal, dan sumber internet yang relevan dengan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi dan kegiatan pelayanan di Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung untuk memperoleh informasi mengenai objek penelitian. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur dan mendalam agar peneliti dapat menggali pengalaman, pengetahuan, tanggapan, serta kondisi yang dialami informan. Pasalong (2013) dan Sugiyono (2023) menjelaskan bahwa wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara langsung untuk memperoleh informasi dari informan. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai catatan, transkrip, buku, dan dokumen lain yang dapat menjadi sumber informasi serta bukti penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama atau *human instrument*. Peneliti berperan sebagai pengumpul data, pengamat, sekaligus analis sejak menentukan informan, melakukan pengumpulan data, menganalisis informasi, hingga menarik kesimpulan. Untuk membantu proses pengumpulan data, digunakan pedoman wawancara semi-terstruktur dengan pertanyaan terbuka yang disusun berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Pedoman tersebut mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi serta digunakan secara fleksibel untuk menggali pelaksanaan kebijakan, kendala, upaya penyelesaian, koordinasi antarinstansi, dan persepsi masyarakat. Informan penelitian meliputi Camat Bandung Kidul, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, petugas PUSKESOS, aparatur kelurahan, dan masyarakat penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasi dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi sehingga dapat ditemukan informasi penting dan ditarik kesimpulan. Sugiyono (2023) menjelaskan bahwa analisis data dilakukan dengan mengatur data ke dalam kategori, menguraikannya ke dalam bagian-bagian penting, menentukan informasi yang relevan, dan menarik kesimpulan agar mudah dipahami. Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi penelitian, reduksi data dilakukan dengan memilih dan memusatkan informasi yang relevan, sedangkan penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi secara sistematis agar hubungan antartemuan dapat dipahami.

Keabsahan data dilakukan untuk memastikan *trustworthiness* atau tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian. Sugiyono (2023) menyebutkan empat kriteria keabsahan data dalam penelitian kualitatif, yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai informan untuk memastikan konsistensi data. Moleong (2016) dan Sugiyono (2023) menjelaskan bahwa triangulasi digunakan untuk mengecek dan membandingkan kepercayaan terhadap data melalui sumber atau cara yang berbeda. Transferabilitas dilakukan dengan memberikan uraian penelitian yang rinci, jelas, dan sistematis sehingga pembaca dapat memahami konteks penelitian. Dependabilitas dilakukan melalui audit terhadap keseluruhan proses penelitian dengan melibatkan pembimbing, sedangkan konfirmabilitas dilakukan dengan menghubungkan hasil penelitian dengan proses penelitian untuk memastikan objektivitas temuan.

Operasional parameter penelitian menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang terdiri atas empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berinteraksi dan dapat mendukung maupun menghambat implementasi kebijakan. Aspek komunikasi dilihat melalui kejelasan informasi kebijakan dan sosialisasi program. Aspek sumber daya mencakup ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran. Aspek disposisi mencakup komitmen pelaksana serta tingkat pemahaman pelaksana terhadap kebijakan. Sementara itu, struktur birokrasi

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

dilihat melalui kejelasan pembagian tugas dan wewenang serta keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP).

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung karena terdapat fenomena pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang menarik untuk dikaji, khususnya untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut telah diimplementasikan. Penelitian berlangsung selama enam bulan, yaitu Januari sampai Juni 2026, yang mencakup observasi awal, penyusunan usulan penelitian, seminar usulan penelitian, penelitian lapangan, pengolahan dan analisis data, penyusunan draf skripsi, seminar draf skripsi, hingga sidang akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung yang berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Bandung No.4 Tahun 2020 menegaskan bahwa prioritas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menurunkan jumlah penduduk miskin, menjamin kebutuhan dasar melalui sinergi program sosial, Pendidikan, Kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, yang didukung oleh Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial). Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana peneliti dituntut untuk dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, disarankan, dan dilakukan oleh sumber data, bukan sebagaimana adanya yang terjadi dilapangan, yang dialami, dirasakan dan dipikirkan oleh sumber data. Dengan demikian, peneliti harus memaparkan, menjelaskan, dan menggambarkan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, kemudian dianalisis dan dimasukan kedalam hasil penelitian, dengan mengaplikasikan pendekatan Implementasi Kebijakan menurut Edward III dalam Winarno (2014:176) yang berkenaan dengan masalah Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung.

Aspek Komunikasi

Komunikasi sebagaimana disebutkan Edward III dalam Winarno (2014:176) merupakan persyaratan pertama dalam terlaksananya implementasi kebijakan yang efektif. Para pelaksana kebijakan dapat mengetahui secara tepat apa yang akan mereka kerjakan melalui tiga hal penting yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (*clarity*). Tidak sempurnanya aspek komunikasi akan menyebabkan para pelaksana kebijakan tidak mengetahui apa yang harus disampaikan secara jelas, akurat dan konsisten serta dapat mengakibatkan para pelaksana kebijakan menafsirkan kebijakan sesuai dengan persepsinya sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Bandung Kidul, beliau menyatakan bahwa

"Program Penanggulangan Kemiskinan dalam kejelasan programnya sudah sesuai dengan yang diarahkan oleh pemerintahan pusat terutama Dinas Sosial Kota Bandung yang selalu diinformasikan kepada masyarakat sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan berlaku, serta masyarakat juga dapat memperoleh informasi melalui Pelayanan Kesejahteraan Sosial Satu Pintu (PKSSP) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) yang berfungsi sebagai pusat informasi dan pengaduan terkait pelayanan sosial, namun terdapat faktor penghambat yaitu sebagian masyarakat yang masih gaptek (gagap teknologi) sehingga penyampaian informasi tidak hanya dilakukan melalui internet ataupun media sosial tetapi melakukan sosialisasi berkala di tiap kelurahan dan memaksimalkan kolaborasi antar instansi".

Hal ini sejalan dengan pendapat Petugas PUSKESOS Kelurahan Mengger yang menyatakan bahwa upaya penyampaian informasi secara berkelanjutan dilakukan agar masyarakat dapat memahami berbagai program yang tersedia serta tidak mengalami kesulitan dalam mengakses layanan sosial. Kejelasan informasi dinilai penting untuk meminimalisir kesalahan pemahaman masyarakat terkait persyaratan administrasi maupun kriteria penerima manfaat. Sementara dari perspektif masyarakat, program PKSSP menjadi program yang sulit diterapkan karena tidak semua warga bisa menggunakan *gadget*, namun terdapat alternatif dengan datang langsung ke kelurahan dan menyerahkan persyaratan kepada PUSKESOS.

Pada pelaksanaannya, komunikasi yang dilakukan seringkali menghadapi berbagai kendala yang dapat menimbulkan persepsi yang berbeda-beda atas kriteria maupun pada proses penyampaian informasi kepada masyarakat, yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan (*noise*) dalam proses komunikasi dengan adanya penafsiran atau interpretasi yang berbeda. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Bandung Kidul, beliau menyatakan bahwa sosialisasi terkait program Penanggulangan Kemiskinan secara rutin dilakukan melalui rapat koordinasi dengan kelurahan, RW, RT, kader sosial, dan petugas PUSKESOS, serta dilakukan sebanyak dua kali dalam sebulan terkait informasi mengenai program bantuan sosial, kriteria penerima manfaat, dan prosedur pengajuan bantuan melalui berbagai forum di wilayah Kecamatan Bandung Kidul. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala karena tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang sama terhadap informasi yang diberikan. Terdapat masyarakat yang

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

menganggap semua warga berhak menerima bantuan padahal terdapat kriteria tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan pemerintah, dan adanya perubahan kebijakan serta pembaruan data penerima manfaat juga terkadang menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Untuk memperoleh jawaban lebih luas, peneliti melakukan wawancara dengan petugas PUSKESOS Kelurahan Mengger yang menyatakan bahwa PUSKESOS berperan dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Informasi biasanya disampaikan melalui pertemuan warga, koordinasi dengan RT/RW, kader sosial, serta saat masyarakat yang belum memahami datang langsung ke PUSKESOS tiap kelurahan. Namun, masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh mengenai persyaratan dan mekanisme program bantuan sosial, dan beberapa masyarakat masih beranggapan bahwa seluruh pengajuan bantuan pasti akan diterima padahal terdapat proses verifikasi dan validasi data yang harus dilakukan terlebih dahulu. Sementara itu dari unsur masyarakat, informan menyatakan mengetahui adanya program bantuan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial dari informasi yang diberikan oleh RT, RW, dan petugas PUSKESOS. Menurutnya informasi yang diberikan sudah cukup membantu terutama ketika ada sosialisasi atau penjelasan langsung dari petugas, tetapi terkadang masih ada masyarakat yang belum memahami persyaratan dan proses pengajuan bantuan karena informasi yang diterima berbeda-beda. Selain itu terdapat juga warga yang merasa bingung ketika pengajuan bantuan tidak langsung disetujui karena mereka belum mengetahui bahwa ada proses verifikasi dan pendataan terlebih dahulu. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Bandung Kidul, Petugas PUSKESOS Kelurahan Mengger, dan masyarakat sebagai penerima informasi program, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti rapat koordinasi, pertemuan warga, RT/RW, kader sosial, serta pelayanan langsung di PUSKESOS, yang menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai program penanggulangan kemiskinan kepada masyarakat sasaran (Edward III dalam Winarno, 2014). Sementara itu dari perspektif masyarakat, informasi mengenai program penanggulangan kemiskinan pada umumnya telah diterima melalui berbagai pihak, baik RT/RW maupun petugas PUSKESOS, akan tetapi sebagian masyarakat masih merasa kurang memahami secara menyeluruh mengenai persyaratan dan mekanisme program sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda terkait penetapan penerima bantuan sosial.

Aspek Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan menduduki posisi tidak kalah pentingnya. Ketiadaan sumber daya atau kurangnya potensi sumber daya akan berakibat fatal dan tidak efektifnya penerapan kebijakan, karena sumber daya manusia yang memadai dapat menunjang kesuksesan dalam penerapan kebijakan serta sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bidang-bidangnya mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Berdasarkan temuan dalam penelitian diketahui bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu hambatan bagi pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ketersediaan sumber daya manusia, sebagaimana unsur pelaksana utama, memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan atau tidaknya pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat. Jumlah personal pelaksanaan kebijakan juga harus sesuai dengan tugas kerja yang akan dilaksanakan. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Bandung Kidul menyatakan bahwa:

"Dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, sumber daya manusia yang terlibat berasal dari pihak kecamatan, kelurahan, petugas PUSKESOS, pendamping sosial, serta didukung oleh pengurus RT/RW dan kader sosial di wilayah Kecamatan Bandung Kidul. Secara jumlah, dalam pelaksanaan kebijakan perlu kolaborasi dalam pelaksanaan kebijakan. Petugas yang ada sudah cukup membantu pelaksanaan program, namun karena banyaknya layanan yang harus diberikan kepada masyarakat dan luasnya cakupan wilayah pelayanan, terkadang petugas harus menangani beberapa tugas secara bersamaan. Dari sisi kompetensi, petugas telah memiliki pemahaman terkait prosedur pelayanan sosial, pendataan masyarakat, dan mekanisme program bantuan sosial. Selain itu, pemerintah juga secara berkala memberikan pembinaan, pelatihan, dan koordinasi kepada petugas agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Meskipun demikian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia masih diperlukan, terutama dalam penguasaan teknologi informasi dan pemahaman terhadap perubahan regulasi yang berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan."

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Petugas PUSKESOS Kelurahan Mengger bahwa jumlah petugas yang ada saat ini pada dasarnya sudah dapat menjalankan tugas yang diberikan, namun karena banyaknya masyarakat yang datang untuk mengajukan berbagai layanan kesejahteraan sosial, terkadang petugas harus menangani beberapa pelayanan secara bersamaan, dan dari sisi kemampuan petugas PUSKESOS telah memahami tugas dan fungsi yang dijalankan, meskipun peningkatan kompetensi masih diperlukan khususnya

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

dalam pengelolaan data berbasis sistem informasi dan pemahaman terhadap kebijakan yang terus mengalami perkembangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Bandung Kidul dan Petugas PUSKESOS Kelurahan Mengger, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan secara umum telah cukup mendukung pelaksanaan program, terlihat dari adanya keterlibatan berbagai unsur pelaksana seperti aparatur kecamatan, kelurahan, petugas PUSKESOS, pendamping sosial, kader sosial, serta pengurus RT/RW yang berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, akan tetapi tingginya jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan serta beragamnya jenis layanan kesejahteraan sosial menyebabkan beban kerja petugas menjadi cukup tinggi, yang mengharuskan petugas menangani berbagai tugas secara bersamaan sehingga berpotensi memengaruhi efektivitas pelayanan apabila tidak didukung oleh koordinasi yang baik (Edward III dalam Winarno, 2014).

Dalam hal ketersediaan anggaran pelaksanaan program, keuangan seringkali dihadapkan pada kondisi yang kurang memadai. Namun demikian, tidak berarti para penentu kebijakan tidak berdaya menghadapi kondisi ini karena upaya memberdayakan sumber daya keuangan yang ada tetap dilakukan. Berdasarkan wawancara dengan petugas Dinas Sosial Kota Bandung, sumber daya keuangan untuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan pada dasarnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung serta didukung oleh sumber pendanaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pelaksanaannya, kebutuhan anggaran sering kali lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan dana yang ada mengingat banyaknya program dan jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Namun Dinas Sosial berupaya mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia melalui penentuan skala prioritas program, peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak, serta pemanfaatan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Bandung Kidul menyatakan bahwa dari sisi pendanaan, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bandung Kidul pada umumnya mengacu pada anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah melalui program-program yang dikelola oleh Dinas Sosial dan perangkat daerah terkait. Pihak kecamatan lebih berperan dalam mengoordinasikan pelaksanaan program serta memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Meskipun terdapat keterbatasan anggaran untuk mendukung seluruh kebutuhan pelayanan sosial, tetapi sejauh ini kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan masih dapat dilaksanakan melalui pengelolaan anggaran yang efektif dan kerja sama dengan berbagai pihak, Hal ini sejalan dengan pernyataan Petugas PUSKESOS Kelurahan Mengger bahwa dukungan anggaran sangat penting karena berkaitan dengan operasional pelayanan, kegiatan pendataan, sosialisasi, serta penanganan berbagai permasalahan sosial yang ada di Masyarakat. Menurutnya anggaran yang tersedia saat ini cukup membantu dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, namun masih terdapat beberapa kebutuhan yang memerlukan dukungan anggaran lebih lanjut terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kegiatan sosialisasi, dan pembaruan data masyarakat secara berkala, sehingga pihak PUSKESOS tetap berupaya memaksimalkan sumber daya yang tersedia agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas Dinas Sosial Kota Bandung, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Bandung Kidul, dan Petugas PUSKESOS Kelurahan Mengger, dapat disimpulkan bahwa sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, di mana ketersediaan anggaran yang berasal dari pemerintah telah dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan seperti pelayanan kesejahteraan sosial, pendataan masyarakat, sosialisasi program, verifikasi data penerima manfaat, serta kegiatan operasional lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan (Edward III dalam Winarno, 2014). Hasil wawancara menunjukkan bahwa secara umum anggaran yang tersedia telah mampu mendukung pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat, namun seluruh informan mengakui bahwa masih terdapat keterbatasan sumber daya keuangan apabila dibandingkan dengan kebutuhan pelayanan yang terus meningkat, keterbatasan tersebut terutama dirasakan dalam pelaksanaan kegiatan pendukung seperti peningkatan kualitas pelayanan, perluasan sosialisasi program, pembaruan data masyarakat secara berkala, serta pengembangan sarana dan prasarana pelayanan.

Aspek Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan aspek ketiga yang memiliki konsekuensi penting bagi efektivitas implementasi kebijakan. Disposisi diartikan sebagai keinginan atau kesepakatan di kalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Disposisi akan menjelaskan kecenderungan pelaksana untuk

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

bertindak, dimana kecenderungan untuk bertindak ini dibentuk oleh lingkungan sosial, politik, ekonomi, yang ada dalam persepsi pelaksana dalam membentuk sikap yang mendukung atau menolak terkait kebijakan dalam pengimplementasian kebijakan.

Bentuk faktor sikap atau kecenderungan (Disposisi) dengan parameter komitmen pelaksanaan program terhadap kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bandung Kidul. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Bandung Kidul menyatakan bahwa

"Kami memiliki komitmen untuk menjalankan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan, yang diwujudkan melalui pelayanan kepada masyarakat, pendampingan terhadap warga yang membutuhkan bantuan sosial, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait agar program dapat berjalan dengan baik, dan berupaya memastikan bahwa bantuan dan pelayanan yang diberikan dapat tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala namun tetap berusaha memberikan pelayanan yang optimal dan mengutamakan kepentingan masyarakat yang membutuhkan."

Dalam upaya memperoleh jawaban dan pandangan yang seimbang, peneliti melakukan wawancara dengan petugas PUSKESOS Kelurahan Mengger yang menyatakan bahwa sebagai petugas PUSKESOS berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang membutuhkan akses terhadap program kesejahteraan sosial dan bantuan sosial, yang diwujudkan dengan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, membantu proses pengajuan bantuan, melakukan pendataan dan verifikasi sesuai prosedur, serta menindaklanjuti berbagai permasalahan sosial yang disampaikan oleh warga, dan menyadari bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan program seperti keterbatasan sumber daya dan banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus dilayani, namun tetap berupaya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memenuhi informasi lebih luas dan komprehensif yang diperoleh dari unsur masyarakat, informan menyatakan bahwa petugas yang menangani program bantuan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial sudah cukup baik dalam melayani masyarakat, di mana ketika membutuhkan informasi atau bantuan terkait pengajuan program sosial, petugas memberikan penjelasan dan arahan yang cukup jelas, serta bersedia membantu apabila terdapat kekurangan dalam persyaratan atau dokumen yang harus dilengkapi, meskipun terkadang proses pelayanan membutuhkan waktu karena banyaknya masyarakat yang dilayani namun petugas tetap berusaha melayani dengan baik dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aspek disposisi atau sikap pelaksana, khususnya pada komitmen pelaksana, telah mendukung implementasi program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bandung Kidul. Para pelaksana menunjukkan sikap positif, tanggung jawab, dedikasi, dan kesungguhan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator komitmen pelaksana dapat dikategorikan baik, karena telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung (Edward III dalam Winarno, 2014). Tingkat pemahaman pelaksana terhadap kebijakan merupakan salah satu unsur penting dalam aspek disposisi implementasi kebijakan, di mana pemahaman yang baik dari para pelaksana mengenai tujuan, sasaran, prosedur, dan mekanisme kebijakan akan memengaruhi efektivitas pelaksanaan program di lapangan, sebaliknya apabila pelaksana kurang memahami kebijakan yang dijalankan maka berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaan program serta menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Bandung Kidul, sebagai pelaksana program memahami bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat, serta memahami tugas dan fungsi masing-masing mulai dari proses pendataan, verifikasi dan validasi data, koordinasi dengan pihak kelurahan dan PUSKESOS, hingga memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria, dan selalu mengikuti arahan, sosialisasi, dan bimbingan teknis dari Dinas Sosial agar pemahaman terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku dapat terus diperbarui sesuai dengan perkembangan kebijakan yang ada.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan petugas PUSKESOS Kelurahan Mengger yang memahami bahwa program penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan miskin agar memperoleh akses terhadap bantuan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial yang disediakan oleh pemerintah, serta memahami prosedur pelayanan yang harus dilakukan mulai dari menerima pengaduan masyarakat, melakukan pendataan, memverifikasi dokumen yang diajukan, hingga memberikan rekomendasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pemahaman tersebut diperoleh melalui sosialisasi, rapat koordinasi, bimbingan teknis, serta pengalaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dengan

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

pemahaman yang dimiliki berupaya memberikan pelayanan yang tepat dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Bandung Kidul dan Petugas PUSKESOS Kelurahan Mengger, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman pelaksana terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan tergolong baik. Para pelaksana memahami tujuan kebijakan, sasaran program, mekanisme pelaksanaan, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung implementasi program penanggulangan kemiskinan (Edward III dalam Winarno, 2014).

Aspek Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III dalam Winarno (2014:176). Struktur birokrasi berkaitan dengan pengaturan organisasi, pembagian tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta prosedur kerja yang digunakan oleh para pelaksana kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas akan memudahkan koordinasi antar pelaksana, memperjelas alur pelayanan, serta mengurangi kemungkinan terjadinya tumpang tindih tugas dalam pelaksanaan program. Dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bandung Kidul, struktur birokrasi memiliki peran penting karena program melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah kota, kecamatan, kelurahan, PUSKESOS, hingga unsur kewilayahan seperti RT dan RW. Oleh karena itu, diperlukan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas agar pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Kejelasan pembagian tugas dan wewenang merupakan salah satu indikator penting dalam aspek struktur birokrasi. Pembagian tugas dan wewenang yang jelas akan membantu setiap pelaksana memahami peran, tanggung jawab, serta batas kewenangannya dalam melaksanakan suatu kebijakan. Dengan adanya kejelasan tersebut, koordinasi antar pelaksana dapat berjalan lebih efektif, mengurangi terjadinya tumpang tindih pekerjaan, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Bandung Kidul, pembagian tugas dan wewenang dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sudah diatur dengan cukup jelas. Dinas Sosial memiliki peran sebagai pembina dan penanggung jawab kebijakan, kecamatan berfungsi melakukan koordinasi, monitoring, dan fasilitasi pelaksanaan program di wilayah. Kelurahan dan PUSKESOS bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, melakukan pendataan, serta membantu proses verifikasi dan validasi data penerima manfaat. Sementara RT dan RW berperan dalam membantu penyampaian informasi serta mengidentifikasi kondisi masyarakat di lingkungannya masing-masing, sehingga setiap pihak dapat menjalankan perannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Hal ini diperkuat oleh pernyataan petugas Dinas Sosial Kota Bandung bahwa pembagian tugas dan wewenang telah diatur sesuai dengan struktur organisasi dan ketentuan yang berlaku. Dinas Sosial memiliki tanggung jawab dalam penyusunan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan, serta koordinasi pelaksanaan program di tingkat daerah. Kecamatan berperan dalam mengoordinasikan pelaksanaan program di wilayahnya, sedangkan kelurahan dan PUSKESOS memberikan pelayanan langsung kepada Masyarakat. Setiap pelaksana memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda namun saling mendukung satu sama lain, dan dengan adanya pembagian tugas yang jelas proses pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan terarah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Bandung Kidul dan Petugas Dinas Sosial Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa pembagian tugas dan wewenang dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan telah berjalan dengan cukup jelas dan terstruktur. Setiap pelaksana kebijakan, mulai dari Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, PUSKESOS, hingga RT dan RW, memiliki peran dan tanggung jawab yang telah ditetapkan sesuai dengan fungsi masing-masing (Edward III dalam Winarno, 2014). Dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bandung Kidul, keberadaan SOP menjadi sangat penting mengingat program melibatkan berbagai instansi dan pelaksana yang memiliki tugas serta fungsi yang berbeda, sebagaimana ditegaskan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Bandung Kidul bahwa SOP menjadi pedoman bagi seluruh petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar setiap proses pelayanan berjalan sesuai aturan yang berlaku, mulai dari penerimaan pengaduan masyarakat, pemeriksaan persyaratan administrasi, verifikasi dan validasi data DTSEN, hingga pemberian rekomendasi bantuan sosial semuanya mengacu pada SOP yang sama, sehingga setiap petugas memahami tugas dan tanggung jawabnya dan pelayanan dapat berjalan lebih tertib, cepat, dan tidak menimbulkan perbedaan perlakuan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Bandung Kidul, keberadaan SOP memiliki peran strategis karena pelaksanaan program melibatkan berbagai aktor seperti Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan, PUSKESOS, dan RT/RW, di mana SOP menjadi pedoman dalam proses pelayanan, pendataan, verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), hingga

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

pemberian rekomendasi bantuan sosial, sehingga setiap pelaksana memahami tugas dan kewenangannya dan pelayanan dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan akuntabel, meskipun efektivitas SOP tetap bergantung pada kepatuhan pelaksana, koordinasi antarinstansi, dan kemampuan menyesuaikan prosedur dengan perubahan kebijakan yang terjadi. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bandung Kidul telah didukung oleh keberadaan SOP yang menjadi pedoman bagi para pelaksana, yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan berbagai tahapan pelayanan sehingga dapat menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan tugas dan meminimalkan terjadinya kesalahan prosedur. Selain itu, keberadaan SOP juga memberikan kepastian bagi pelaksana maupun masyarakat terkait mekanisme pelayanan yang harus dijalankan, dan dengan adanya prosedur yang jelas proses pelayanan dapat berlangsung secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel, yang menunjukkan bahwa aspek struktur birokrasi khususnya terkait keberadaan SOP telah mendukung implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bandung Kidul (Edward III dalam Winarno, 2014).

Faktor Pendukung, Penghambat, dan Upaya Implementasi Kebijakan

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung meliputi adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antar pelaksana, ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, komitmen dan pemahaman pelaksana yang baik, kejelasan struktur birokrasi dan SOP, serta dukungan masyarakat dan perangkat kewilayahan. Di samping berbagai faktor pendukung, pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bandung Kidul juga menghadapi beberapa hambatan, antara lain ketersediaan anggaran yang terbatas menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program. Besarnya kebutuhan masyarakat sering kali tidak sebanding dengan kemampuan anggaran yang tersedia sehingga belum seluruh kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berlangsung secara cepat menyebabkan data kemiskinan harus terus diperbarui. Beberapa kondisi masih ditemukan masyarakat yang layak menerima bantuan tetapi belum terdata atau sebaliknya terdapat data yang perlu diperbarui agar sesuai dengan kondisi terkini. Masih terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya memahami persyaratan, mekanisme, dan kriteria penerima bantuan sosial yang sering menimbulkan kesalahpahaman terkait proses pengusulan maupun penyaluran bantuan sehingga membutuhkan sosialisasi yang lebih intensif. Banyaknya masyarakat yang mengajukan pelayanan kesejahteraan sosial menyebabkan beban kerja pelaksana menjadi cukup tinggi yang berpotensi memengaruhi kecepatan pelayanan terutama ketika jumlah petugas yang tersedia terbatas. Selain itu perubahan regulasi maupun kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah mengharuskan pelaksana untuk terus menyesuaikan diri dengan ketentuan terbaru yang apabila tidak diikuti dengan sosialisasi dan pembinaan yang memadai dapat menjadi kendala dalam proses implementasi kebijakan.

Kecamatan Bandung Kidul telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan program dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran melalui koordinasi, fasilitasi, pengawasan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Bandung, kelurahan, PUSKESOS, serta perangkat kewilayahan seperti RT dan RW. Meningkatkan akurasi data masyarakat miskin dan rentan melalui kegiatan verifikasi dan validasi data secara berkala. Meningkatkan sosialisasi dan penyaluran informasi kepada masyarakat. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui PUSKESOS dan aparatur pelaksana. Selain itu juga monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Dari hasil pembahasan dan analisis, secara empirik diketahui bahwa pendekatan teori implementasi kebijakan Edward III dengan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi belum optimal dan berdasarkan penarikan makna dari penelitian ini ditemukan dimensi lain yaitu Dimensi Kolaborasi Antaraktor sebagai enabler yang mengembangkan teori implementasi kebijakan Edward III. Pentingnya dimensi Kolaborasi Antaraktor dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan perekat keterlibatan berbagai pihak terkait seperti Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan, PUSKESOS, RT/RW, kader sosial, dan Masyarakat untuk keberhasilan program yang berkelanjutan (Edward III dalam Winarno, 2014).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ditarik simpulan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung berdasarkan pendekatan teori faktor-faktor implementasi kebijakan dengan dimensi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi belum optimal dan berdasarkan penarikan makna dari penelitian ini ditemukan dimensi lain yaitu Dimensi Kolaborasi

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

Antaraktor sebagai enabler yang mengembangkan teori implementasi kebijakan Edward III dapat mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan. Pentingnya dimensi Kolaborasi Antaraktor dalam Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan perekat keterlibatan berbagai pihak terkait seperti Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan, PUSKESOS, RT/RW, kader sosial, dan Masyarakat untuk Keberhasilan program yang berkelanjutan.

REFERENSI

Badan Pusat Statistik. (2025). Berita resmi statistik: Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2025. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

Edwards, G. C., III. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21(1), 33–54.

Moleong, L. J. (2016). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.

Pasolong, H. (2013). Metode penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya.

Pemerintah Kota Bandung. (2020). Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Pemerintah Kota Bandung. (2024). Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Satu Pintu.

Prastowo, A. (2012). Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian. Ar-Ruzz Media.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Riduwan. (2012). Metode dan teknik menyusun proposal penelitian. Alfabeta.

Sugiyono. (2015). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Sugiyono. (2023). Metode penelitian kualitatif untuk penelitian yang bersifat eksploratif, interpretif, interaktif, dan konstruktif. Alfabeta.

Walidin, W., Saifullah, & Tabrani. (2015). Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory. FTK Ar-Raniry Press.

Winarno, B. (2014). Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus. CAPS.